

Politik Wacana di Media Sosial Twitter Menjelang Pemilihan Presiden Indonesia 2014

Tian Belawati

Pembimbing Jurnalistik SMAN 1 Krian
Sidoarjo
tianblwt@gmail.com

Abstract

Most of Indonesian politicians used internet and social media for campaign. The phenomena of *twitwar*, *counter attack tweet*, and *black campaign* using ironical and sarcasm words were massively appearing during presidential election which has been held in July 2014. The *black campaign* which was appearing pointed to represent characters of an actor or a candidate of president. This study is aimed to answer what topics written by cyber activists and politicians during January to April 2014, to find the discourse politics in representing the actors, and also to map the democratic action during campaign period in the twitter. The subjects of this study were twitter accounts of @Fadjroel, @PartaiSocMed, and @TrioMacan2000. The *critical discourse analysis* within *critical linguistics* approach by Theu Van Leeuwen was used to analyze the marginalization and the discourse politics. Theory of cyber culture, cyber sphere, and democratic in cyber space were used to be frameworks. The result tells that the sarcasm and ironical words were used to be discourse politics in representing the actors. The ironical and sarcasm words were used as democratic form in social media which made youth as target readers considering youth were the most active users.

Keywords: *democracy, twitter, irony, discourse, President*

Pendahuluan

Menjelang pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, kebebasan dalam mengunggah tulisan tersebut menimbulkan beberapa wacana kontroversial mengenai presiden saat ini dan calon presiden yang menjabat tahun 2014-2019. Dalam konteks menjelang pemilihan umum Presiden 2014 ada makna yang tersembunyi di balik unggahan-unggahan tersebut. Wacana kontroversial mengenai Presiden dan calon Presiden muncul di dalam akun *twitter anoname* dan akun *twitter* resmi aktivis dengan melakukan perang status (*twitwar*). Sehingga berakibat kondisi politik di Indonesia menjadi kurang sehat dengan

adanya *black campaign* atau kampanye hitam melalui tulisan pada *tweet-tweet* mereka, seperti contoh:

'suara lumpur, suara galau :)' > Golkar: Pemilu Serentak Bakal Timbulkan 'Kegagalan' politik kom.ps./AfeWda #pemiluSERENTAK (Rachman, 2014)
Kalimat-kalimat ironi yang mengandung sindiran langsung tersebut sengaja ditujukan kepada beberapa akun lain untuk ditanggapi, sehingga menimbulkan *twitwar* dan *counter attack tweet*. *Counter attack tweet* adalah sebuah *tweet* yang ditujukan pada akun-akun yang telah menyerang akun lain. Bisa disebut *tweet* serangan balik. Hal ini merupakan bagian dari *twitwar*.

Dalam mewacanakan sosok Presiden melalui media sosial *twitter*, beberapa akun menggunakan leksikon, metafora, dan grafis yang bermacam-macam, sehingga menjadikan representasi sosok presiden bermacam-macam pula. Representasi sosok presiden oleh tiap akun dilakukan dengan menggunakan pola saling serang dengan kalimat ironi dan sarkasme. Pola pewacanaan tersebut memberikan efek berbeda terhadap citra sosok Presiden yang dibicarakan.

Naiknya citra Calon Presiden dan Presiden dapat diketahui melalui fitur *twitter re-tweet* (mengunggah ulang) dan *like* (suka), yang menunjukkan akun lain juga sepakat. Semakin banyak retweet atau like yang diberikan terhadap status yang mewacanakan sosok Presiden atau calon Presiden, maka menjadi terkenal-lah status tersebut, serta semakin banyak masyarakat internet (netizen) yang tahu. *Tweet-tweet* aktivis politik mengenai sosok Presiden semakin gencar ketika media massa mulai menilai sebagai bentuk pergeseran budaya berpolitik. Informasi media massa mengenai *tweet* dan akun kontroversial di *twitter* telah berhasil menyambungkan dua masyarakat Indonesia, yakni yang berada di dunia nyata dan berada di dunia maya (Menurut AntaraNews.com tahun 2012 sekitar 75,77% atau belum mengakses internet. 24,23% warga Indonesia bisa mengakses Internet) untuk sama-sama tahu kondisi praktek politik di media sosial terutama *twitter*.

Terkait dengan naiknya jalinan hubungan sosial antara partai, politisi, dan aktivis di dalam media sosial khususnya *twitter*, artikel ini akan membahas bagaimana demokrasi dilakukan oleh politisi dan aktivis di dunia maya

menjelang pemilihan Presiden 2014. Artikel ini juga akan membahas bagaimana bentuk kebebasan dari tindakan pewacanaan sosok Presiden, serta bagaimana sebuah demokrasi tercipta di media sosial *twitter*.

Landasan Teori

Internet dan Demokrasi

Demokrasi dan *space* adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya bukan bentuk yang unik atau kebetulan. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya *space*, karena demokrasi membutuhkan wadah untuk terwujud. Wadahnya demokrasi tidak lain adalah negara dan masyarakatnya. Dimana negara selalu diwujudkan dengan adanya sebuah pemerintahan secara fisik dan dihitung dengan skala ‘berapa besar’.

Para teoris demokrasi selalu menilai kebenaran demokrasi sebagai metafora yang harus direalisasikan. Demokrasi selalu ditanyakan dimana seharusnya ditempatkan, bagaimana harusnya dilakukan, oleh siapa harusnya dilakukan, dan bagaimana pengaturannya. Diana Saco dalam bukunya menyebutkan bahwa teoris-teoris tersebut justru memetakan demokrasi utopia, yang ada demokrasi tidak tercipta atau belum memenuhi syarat ideal *space* yang mereka inginkan (Saco, 2002).

Bagi Diana Saco, para ahli demokrasi masa lampau belum bisa memenuhi pola demokrasi di era *cyber*. Menurut Saco, kesalahan teoris demokrasi adalah *misunderstanding* mengenai sifat dasar *space*. Mereka cenderung menilai bahwa kondisi ruang politik itu statis, secara fisik ditempatkan, dan memperlakukan masyarakat seolah-olah menempati dan memiliki akses di ruang tersebut. Hal yang juga dibantah oleh Diana Saco kepada teoris Demokrasi adalah pemikiran mengenai keadaan manusia.

Seperti teoris Hanna Arendt, ia menekankan demokrasi pada etos berpidato dan bertindak di dalam suatu ruang. Arendt menempatkan demokrasi dalam wadah yang sama dan pada posisi egaliter. Dia berpendapat bahwa teknologi akan mengubah dan merangsang pemikiran manusia, serta menggeser pola interaksi manusia, dari yang nyata ke yang abstrak (Saco,

2002). Begitu juga dengan Habermas, baginya demokrasi melalui teknologi akan mengubah struktur sosial masyarakat mulai dari tingkat sosial, ekonomi, maupun pengetahuan. Adanya korporasi yang menguasai media masa membuat informasi terjual secara masive. Ketika informasi terjual secara masive, maka ruang private yang selama ini digambarkan oleh Habermas akan beralih menjadi ruang publik. Di era moderen, Habermas meninjau ulang pernyataannya dan menganalisis filsafat Horkheimer dan Ardono mengenai dialektika pencerahan dan teori mengenai massa sosial yang sangat dominan pada tahun 1950-an. Ia mengatakan bahwa ketika korporasi besar menguasai ruang publik (*public sphere*), maka yang terjadi adalah perubahan dari area debat rasional menjadi salah satu konsumsi yang manipulatif dan sebuah kepasifan (Kellner, 1990).

Meskipun demikian banyak yang berpendapat bahwa teknologi internet dapat menyumbangkan hal-hal positif bagi demokrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Leslie David Simon, menurutnya internet dapat menciptakan mimpi demokrasi. Internet juga dapat memenuhi karakteristik khusus terbentuknya demokrasi yang mampu mengikis totalitarianisme: Pertama, internet dapat menembus batas. Menurut Simon, *bit-bit* digital dalam internet dapat mengatasi permasalahan batas fisik dan politik melalui serat optik atau satelit. Informasi yang diunggah oleh penggunanya mengalir tanpa bisa berhenti. Kedua, karena kemampuannya menembus batas, internet mengurangi kontrol pemerintah terhadap masyarakat. Kemampuan tersebut merupakan fasilitator kemampuan internet yang kedua, yakni meningkatkan kemampuan warga negara secara dramatis untuk ‘mencari, menerima, dan menanamkan informasi dan gagasan melalui media apapun terlepas dari batasan-batasan’. Ketiga, internet dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup berserikat secara bebas dengan orang yang memiliki pandangan dan minat yang sama (Simon, Corrales, & Wolfensberger, 2002).

Kempat, internet juga dapat mengurangi upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan warga negaranya. Hal yang paling menarik dari hal ini adalah terlihatnya pergeseran dari kekuatan pemerintah yang mengatur kepada

kekuatan individu untuk menghindari peraturan pemerintah. Kelima, internet membuat kekuatan pemerintahan bersifat mendua. Hal ini karena mengingat industri internet telah menembus otorisasi pemerintahan. Di satu sisi pemerintah ingin berkuasa dan berdaulat, namun di sisi lain pihak pemerintah justru kehilangan kontrolnya untuk menguasai dan mengikuti perkembangan industri yang pesat. Keenam, kecepatan perkembangan dan penyebaran teknologi sulit dicegah dan diatasi oleh pemerintahan manapun, khususnya pemerintahan yang hanya mengandalkan kontrol terpusat. Negara yang bersifat demokratis dan otoriter bahkan tidak akan mampu mengatasi perkembangan tersebut, bahkan sering terjadi kekacauan dalam pemerintahan. Apalagi di dalam negara Demokrasi, segala kebebasan terjadi di dunia maya, namun ada solusi yang dapat dilakukan oleh negara demokrasi, adanya *check and balance* yang harusnya menjadikan kekacauan di suatu negara bisa teratasi (Simon, Corrales, & Wolfensberger, 2002).

Ke-tujuh, internet dapat mengubah pola kerja pemerintahan, memaksa mereka memperbaharui diri, dan menjadi lebih demokratis dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: keterbukaan dan akses. Informasi yang disajikan oleh pemerintah bersifat *on-line*, dan dapat diakses oleh warganya. Sehingga pemerintah yang menyembunyikan sesuatu dari warganya berhak cemas dengan adanya internet. Ke-delapan, internet dapat memberdayakan individu dan institusi-institusi kecil melalui berbagai macam cara. Dari berbagai keadaan konsumen lebih banyak diberdayakan oleh akses *on-line* terhadap harga dan informasi produk, dan bahkan bisa melakukan tawar-menawar dalam pembeliannya. Ke-sembilan, salah satu dasar demokrasi adalah pendidikan gratis. Internet mampu memberikan pendidikan yang secara luas kepada siapa saja yang dapat mengakses. Kelak masyarakat tidak harus hadir di sekolah-sekolah secara fisik. Mereka dapat mengakses ilmu melalui internet (Simon, Corrales, & Wolfensberger, 2002).

Demokrasi di era modern ini memiliki bentuk yang berbeda, yakni bersifat partisipan. Dua dari ciri varian dari partisipan demokrasi adalah kelangsungan partisipasi rakyat di ranah pemerintahan serta terciptanya

deliberasi pada formasi opini di ranah politik. Dikatakan oleh Dieter Fuchs bahwa demokrasi di era modern ini dapat mencapai deliberasi dengan bantuan elektronik. Fuchs melihat ini dari sudut pandang Habermas yang mengatakan bahwa modern demokrasi tidak hanya membutuhkan mekanisme sistematis atau tawar-menawar, namun juga membutuhkan wadah untuk berkomunikasi. Ia juga mengatakan bahwa di era modern ini liberal demokrasi pada pemerintahan tidak lama lagi akan digantikan oleh partisipatori demokrasi, hal ini karena tidak mungkin demokrasi yang rakyatnya memimpin dirinya sendiri terjun secara serempak ke wadah pemerintahan yang kecil. Kemudian deliberasi tidak semudah yang dikatakan oleh Habermas sebagai kesepakatan dari hasil perbincangan. Karena perbincangan yang tak sistematis dari rakyat juga tidak akan menghasilkan sebuah nilai deliberasi. Media berbasis elektronik, melalui sifatnya yang komunikatif mampu menampung suara dari tempat satu ke tempat yang lain tanpa melihat perbedaan. Rakyat memiliki kesamaan tempat untuk menyuarakan pendapatnya. Sehingga sebuah deliberasi dapat dicapai apabila bentuk wadah dan arah percakapannya lebih sistematis (Zittel & Fuchs, 2007).

Media sosial yang berbasis internet menuntut penggunaannya untuk terbuka dengan pola menulis menjadikan beberapa kelompok cenderung bebas melakukan hal yang disukai. Remaja lebih banyak menuliskan teks untuk komunikasi dengan sesama, mereka mencapai 100 kali kirim teks melalui media sosial. Kelompok dewasa 18-34 tahun lebih cepat lagi. Mereka menggunakan *blog* untuk menuliskan ide-ide mereka. Menurut Mary Cross, tujuan dari perilaku *on-line* masyarakat melalui media sosial tidak lain adalah untuk hiburan semata (Cross, 2011). Keterbukaan yang ditawarkan oleh media sosial membawa sekelompok masyarakat ke arah demokrasi yang sesungguhnya.

Metode Penelitian

Objek penelitian ini ada pada akun yang dikenal sebagai ‘*opinion leader*’, menurut Glock dan Nicosia *opinion leaders* adalah bukan hanya sebuah channel informasi namun juga sebuah tekanan sosial yang mengharuskan seseorang untuk memilih suatu pilihan (Glock and Nicosia, 1963). Sedangkan menurut Roger dan Cartano, *Opinion leaders* adalah orang-orang yang membawa pengaruh besar yang dapat mempengaruhi orang lain dalam mencari nasihat atau informasi (Sohn, 2005). Ketiga akun tersebut diantaranya @Fadjroel memiliki lebih dari 337.000 pengikut, @PartaiSocMed memiliki 35.000 pengikut, dan @TrioMacan2000 memiliki lebih dari 647.000 pengikut. Adapun limitasi waktu penelitian ditujukan pada bulan Januari-April 2014, hal ini karena pada kurun waktu tersebut semua partai berlomba mempresentasikan visi misi partai serta kandidat calon presiden yang mereka bawa. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti terjun ke area *twitter* untuk mencari, mengamati, dan mengambil data. Memasuki tahap kedua, yakni reduksi. Proses reduksi data menurut Matthew B. Miles merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama proyek yang berorientasi pada kualitatif berlangsung. Reduksi ini juga bisa dilakukan dengan penyeleksian ketat dan penggolongan terhadap data yang sudah ditemukan (Miles, 1992).

Dalam hal analisa, peneliti berpegang dari fenomena yang terjadi di sekitar proses interaksi di dunia maya, maka penelitian ini menggunakan Metode Analisis Wacana Kritis dengan pendekatan analisis bahasa kritis atau *critical linguistics*. *Critical linguistics* ini dibawa oleh sekelompok pengajar dari Universitas East Angalia pada tahun 1970-an. Dalam analisa sebuah wacana bahasa digunakan oleh seseorang untuk menunjukkan nilai ideologi atau tujuan tertentu. Ideologi itu secara umum menunjukkan bagaimana suatu kelompok berusaha memenangkan dukungan publik, dan bagaimana kelompok

lain berusaha dimarjinalkan lewat pemakaian bahasa dan struktur gramatika tertentu (Eriyanto, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Cinta Negara (@TrioMacan2000 Vs. @PartaiSocMed)

Pada bulan Februari terdapat kuliah twitter (kultwit) dari akun @TrioMacan2000 mengenai calon presiden Indonesia yang telah menghancurkan pertahanan pangan. Calon Presiden yang disebutkan adalah Dahlan Iskan dari partai Demokrat. Dalam kultwit tersebut, akun @TrioMacan2000 menganalisis skandal yang diduga Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN menerima dana sebagai upaya pencalonan presiden.

Di dalam kultwitnya dituliskan beberapa nama instansi, pihak asing, dan bahkan pejabat yang juga calon presiden. Yakni: dari pihak instansi: BULOG, Koperasi ABRI, PTPN, RNI, PPI, BUMN, TNI AL, Polisi Pelabuhan, Bea Cukai & Karantina, PT PELINDO/ Syahbana, dan KPK; dari pihak asing: BOGASARI, Teluk Intan Cs, Mafia lokal (ASIONG, AMAN Jaya, Susanto Aman Cs); Konglo Hitam, dan pejabat BUMN Dahlan Iskan yang saat itu dikabarkan akan dicalonkan menjadi Presiden RI 2014.

Dalam konteks pemilihan kosa kata, kultwit tersebut menggunakan bahasa baku atau bersifat formal dan bahasa tidak baku atau bersifat informal. Sisi informal dibentuk melalui beberapa *tweet* yang disertai *paralanguage* atau cara suatu kalimat diucapkan. Dalam *tweet* ironi tersebut terdapat beberapa kata yang merupakan bagian dari *paralanguae* atau cara yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya sebuah kalimat diucapkan. Salah satu *paralanguage* yang menjadi ciri khas akun ini adalah kalimat ‘eng ing eng...’:

1. Eng ing eeng .. Kita sdh bahas mafia pangan ya, terkait dgn ketahanan pangan yg jadi bagian integral ketahanan nasional Indonesia (@TrioMacan2000 2014)

Kata ‘eng ing eng’ adalah sejenis *paralanguage* atau sebuah kata yang ditulis untuk ditunjukkan fonologinya. Kata ‘eng ing eng’ tersebut sama halnya dengan sapaan badut ‘taraa!!’ ketika ia sedang mengeluarkan kejutan. Kalimat

‘eng ing eng’ tersebut menjadi prolog sebuah kultwit, dan kemudian menjadi karakteristik khusus akun @TrioMacan2000.

Selain itu, akun @TrioMacan2000 juga kerap menggunakan *paralanguage* ‘hehe’ dan ‘haha’ yang menurut David Crystal kalimat tersebut adalah bentuk *emotional noises*. Umumnya digunakan untuk menunjukkan *visual distinctiveness* atau kejelasan visual dalam menyampaikan sebuah kalimat (Crystal, 2003).

41. *Bogasari lalu menggandeng jenderal Luhut Panjaitan (menteri perdagangan/perindustrian). Tapi tentu tidak gratis hehe*
 44. *Selain suap miliaran, Dirjendagri yg tanda tangan SNI minta dikirimkan sapi Bengali 8 ekor ke Cianjur, Jabar. Untuk apa? Emboh hehe*
 47. *Terjadilah perang antar mafia besar (Salim grup) vs mafia lokal (Asiang, Aman Jaya, Susanto Aman cs). Kami hanya nonton dari jauh hehe (@TrioMacan2000 2014)*

Kata yang menunjukkan tertawa, ‘hehe’, digunakan untuk menunjukkan bahwa ia sedang meredam suasana (Monseour, 2005). Sedangkan tertawa ‘hahaha’ memiliki arti bahwa pernyataan yang ditulis memang benar-benar lucu dan menarik untuk dibahas (rikochet, 2008). Dalam kultwit tersebut tertawa yang paling sering muncul adalah kata ‘hehe’. Maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa berita ketegangan yang dituliskan juga cukup banyak, sehingga ia meredam dengan kalimat tersebut.

Berkaitan dengan isu calon Presiden, di dalam kultwit tersebut ada dua subyek yang ditampilkan melakukan tindakan aktif bersifat negatif terhadap NKRI. Pada *tweet* pertama hingga keenam ditampilkan bagaimana Indonesia belum menjadi negara yang berdaulat atau merdeka. *Tweet* ketujuh hingga tiga belas menampilkan sebab lemahnya ketahanan Nasional karena kurangnya stok energi seperti BBM. Di dalam *tweet* tersebut juga diselipkan pertanyaan tindakan negatif yang dilakukan oleh mereka adalah mengimpor bahan pangan dari luar Negeri, sehingga menjadikan pertanian Indonesia mengalami kerugian, dan pertahanan pangan Indonesia melemah yang dapat mengakibatkan ketahanan Nasional melemah, dan tidak akan tercipta kedaulatan Indonesia.

Subyek pertama yang melakukan tindakan negatif adalah orang asing yang terdiri dari konglomerat Cina, Singapura, dan Malaysia. Informasi mengenai tindakan oknum asing yang mencoba merusak pertahanan pangan Indonesia disusun dengan strategi peletakan kalimat aktif pada bagian depan yakni *tweet* nomor 6 dan 13, seperti:

6. *Jika asing mau, dengan mudah bikin Indonesia hancur dgn mengobok2 pasar modal, hancurkan rupiah, blok impor BBM dan pangan dst*
 13. *Besar kemungkinan kontraktor minyak asing tdk bersedia mengalirkan minyak di deponya ke depo Pertamina. Mati deh kita*

Subyek kedua adalah Mafia pangan Pribumi seperti Koperasi ABRI, BUMN seperti PTPN - RNI - PPI - BULOG dan salah satu yang disebutkan adalah salah satu calon presiden dari Partai Demokrat Dahlan Iskan. Subyek kedua diletakkan pada bagian akhir yakni mulai dari *tweet* no 17 hingga 60.

31. *Teluk Intan cs mengimpor gandum & terigu langsung China, Dubai, Australia, AS, Kanada dll. Puncaknya tahun 2000 luarbiasa impor mereka*
 41. *Bogasari lalu menggandeng jenderal Luhut Panjaitan (menteri perdagangan/perindustrian). Tapi tentu tidak gratis **hehe***

Hal yang paling menarik dari kultwit ini adalah bagaimana wacana sosok calon Presiden yang dikeluarkan oleh akun @TrioMacan2000. Posisi informasi mengenai Dahlan Iskan sebagai pejabat BUMN mampu disuap oleh pihak asing untuk sebuah impor bahan pangan diletakkan pada dua paragraf terakhir. Sedangkan informasi skandal importisasi yang menyebabkan mafia Cina kaya raya dan munculnya sebuah kebijakan impor terbatas dimunculkan pada *tweet* nomor 55 hingga 63:

55. *Kenapa [@KPK_RI](#) tdk mau tangkap korupsi pajak bea masuk terigu/gandum triliunan per tahun itu ? Emangnya berani sama Salim ? **Hahaha***
 56. *Dan bukan hanya Salim Grup yang lakukan ini. Semua importir terigu/mafia melakukan hal yg sama. Hasilnya ? membuat kaya raya*
 57. *Di Medan, CV Aman Jaya sblm 1997 Tidak Dikenal. Tapi kini menjadi yg terbesar meski pemiliknya Susanto Aman telah Mati tahun 2010*
 58. *Mafia GULA skrg dipegang oleh ASIANG, kantornya dekat BI Cabang Medan, depan lapangan Merdeka Medan. Raja Gula Indonesia **hehe***
 59. *Kebijakan importir terbatas / API pada sektor pangan mengakibatkan BUMN2 seperti PTPN - RNI - PPI - BULOG jadi Antek Mafia Pangan*

60. *Konglo hitam dpt jatah beras/gula beli kuota ke antek mafia pangan BUMN2. Kami saja pernah mau disuap Dahlan Iskan dgn kuota Gula hehe*
61. *Tapi kami adalah RONIN NKRI, ga doyan suap ga doyan uang, hny butuh kemenyan sekilo kalau ada pejabat tinggi korup berhasil ditahan hehe*
62. *Para cina mafia beras, gula, terigu dll bersama2 lobby PTPN /RNI/ PPI / BULOG melalui kroni2 dahlan iskan, suap miliaran. Capres hehe*
63. *Jika Dahlan Iskan & anteknya2 Amal Ghozali, Ismet H Putro dll sdh disuap pihak lain, mafia2 itu ke Gub / KaPolda / Pangdam. Usaha hehe*

Hal ini bukan hanya persoalan tata bahasa antar anak kalimat, namun juga strategi penggabungan dua fakta yang memakai pola akibat-sebab. Sesuai dengan konteks menjelang pemilihan Presiden Indonesia 2014, di mana masyarakat membutuhkan informasi seputar calon-calon terbaik, akun @TrioMacan2000 menampilkan Dahlan Iskan sebagai calon Presiden yang menghancurkan Ketahanan Nasional melalui penerimaan suap. Dengan mewacanakan sosok calon Presiden yang mudah disuap pihak asing untuk menghancurkan pangan, akun @TrioMacan2000 dengan kalimat-kalimat informalnya sebenarnya ingin mengatakan bahwa presiden yang baik bukanlah mereka yang bekerjasama dengan pihak asing untuk menghancurkan ketahanan Nasional.

Dalam mewacanakan sosok Presiden, akun @TrioMacan2000 menggunakan model *inclusion* pola *differensiasi*. *Differensiasi* yang dilakukan ini menggunakan praktik bahasa *disfemisme*. Yakni pengasaran bahasa. Dalam pengasaran bahasa tersebut menjadikan pembaca tersugesti bahwa bahwa pejabat BUMN yang hendak dicalonkan menjadi Presiden tidak pantas dipilih karena melakukan tindak kejahatan. Wacana ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa calon Presiden pilihannya adalah yang tidak mungkin menghancurkan ketahanan negara dan dapat menjaga ketahanan negara.

Berbeda dari akun @TrioMacan2000 yang mewacanakan sosok Presiden yang cinta negara, @PartaiSocMed pada bulan Februari menuliskan kutweet yang isinya mengenai paham Fasisme. Pada tanggal 22 Februari 2014 akun @PartaiSocMed telah menuliskan mengenai Fasisme yang ditujukan

kepada akun @TrioMacan2000. Kemudian pada tanggal 24 akun @PartaiSocMed menuliskan beberapa *tweet* yang membahas mengenai pemimpin paham Fasisme yang masih ada di Indonesia. Ringkasan kultwit tersebut telah diunggah 18 kali dan dijadikan 11 kali favorite oleh pengikutnya.

Pada kultwit tersebut diceritakan oleh akun @PartaiSocMed bahwa paham fasisme adalah paham radikal yang bersifat rasis. Dalam kultwit tersebut diberikan contoh Zionis yang memusuhi bangsa non Yahudi. Empat *tweet* pertama merupakan bentuk kutipan dari pernyataan Vladimir Jabotinsky, yang dikenal luas sebagai wakil terpenting Yahudi Zionis. Kutipan tersebut ditulis oleh Vladimir Jabotinsky pada tahun 1930-an. Dalam kutipan tersebut diceritakan bahwa Zionis menganggap bangsa lain tidak lebih tinggi atau mereka rendah jika dibanding kelompok bangsa mereka. Bagi mereka hukum tertinggi adalah keselamatan dan kejayaan bangsa mereka. Berpijak dari kutipan tersebut, akun @PartaiSocMed menceritakan bahwa kaum Zionis sering rasis. Menurutnya fasisme membuat rakyat-rakyatnya harus berpikir seragam, tidak boleh berbeda dari yang lain. Untuk mencapai itu fasisme juga memakai kekerasan agar rakyatnya menjadi seragam.

Cerita mengenai kekejaman bangsa Sparta, akun @PartaiSocMed menggunakan kata baku. Hal ini menjadikan pembaca dapat menilai bahwa informasi yang disampaikan menggunakan nada serius atau tidak main-main. Namun, kalimat yang digunakan merupakan kalimat sarkasme, dimana bertujuan untuk menyindir secara terang-terangan. Subyek pembicaraan yang dijadikan bahan sindiran secara terang-terangan dalam tweet ini adalah orang kedua jamak, yakni ‘mereka’. ‘Mereka’ yang dimaksud dalam pembicaraan tersebut adalah bangsa atau ras yang memakai paham fasisme. ‘Mereka’ yang melakukan kekejaman adalah raja Leonidas dari kaum Sparta zaman Purba.

| Subyek | Kata Kerja |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bangsa Sparta / Zionis ➤ Pemerintahan terdahulu/ Rezim | <i>menerapkan, mengabdikan, menghasilkan, membunuh, menentukan, mendapatkan, membangkitkan, menghalalkan, menganggap, menunggu,</i> |

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| Fasisme | <i>menunggangi, memanfaatkan.</i> | <i>menggapai,</i> |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|

Tabel Kata Kerja 2

Menurut Fairclough, kalimat aktif yang menyebutkan lengkap (subyek+predikat+obyek) merupakan bentuk penampilan sebuah tindakan yang menyebabkan sebuah dampak (Eriyanto, 2006). Dampak yang didapat dari tindakan Fasisme yang diceritakan tersebut adalah hilangnya kebebasan dan toleransi, yang tertuang dalam dua *tweet* terakhir:

Saat mereka menggapai kekuasaan maka tidak akan ada lagi kebebasan yg selama ini mereka manfaatkan untuk mencapai tujuannya itu. Tak akan ada lagi toleransi, tak ada lagi kebebasan berpikir dan berpendapat, bahkan tak ada lagi kebebasan selera berbusana! (Media, 2014)

Dari persatuan antara kata kerja aktif dan informasi yang menyatakan dampak, maka kultwit tersebut secara tidak langsung dapat mensugesti khalayak bahwa pemimpin kaum Zionis atau pemimpin bangsa Sparta adalah contoh pemimpin yang kejam.

Dalam konteks pemilihan umum Presiden 2014, masyarakat akan mencari tahu bagaimana karakter calon-calon Presiden yang baik. Informasi mengenai kepemimpinan bangsa Sprata tentunya akan dikaitkan dengan bagaimana pola pemerintahan yang ditawarkan oleh semua calon Presiden. Ditambah, informasi ini ditujukan pada politisi yang memiliki kemiripan karakter seperti bangsa Sparta. Hal tersebut didukung dengan pernyataannya dalam *tweet* nomor dua puluh tiga:

23. Negara kita sendiri pernah mengalami masa2 rejim fasis dimana perbedaan pendapat dg penguasa bisa berakibat fatal (Media, 2014).

Secara tidak langsung dalam kultwit tersebut akun @PartaiSocMed ingin mengingatkan kembali bahwa di negara Indonesia pernah terjadi pemerintahan yang menganut paham radikal fasisme yang berakibat fatal terhadap kebebasan masyarakat.

Wacana sosok aktor atau Presiden yang ditulis oleh akun @PartaiSocMed adalah menggunakan pola *asimilasi*. Yakni wacana yang

menampilkan aktor sebagai kategori pihak berideologi fasisme dipandang buruk. Ketika penampilan aktor berideologi fasisme itu buruk, secara tidak langsung ia juga menawarkan aktor yang memiliki karakter berbeda. Praktik pemakaian bahasa pada pola asimilasi ini adalah *disfemisme*, yakni bahasa pengasaran atau sarkasme. Pembaca akan diberi kata-kata yang menjadikan mental mereka takut dan benci kepada objek pembicaraan.

Kedua kultwit milik @TrioMacan2000 dan @PartaiSocMed tersebut akhirnya muncul sebagai twitwar di Bulan Februari. Saat akun @TrioMacan2000 menuliskan kultwit mengenai ketahanan Nasional dan Ketahanan pangan, akun @PartaiSocMed menuliskan kultwit fasisme. Twitwar bisa terjadi karena akun @TrioMacan2000 dengan kalimat kasarnya memojokkan calon presiden sebagai antek konglomerat Cina untuk korupsi dan menghancurkan ketahanan pangan Indonesia. Tidak terima dengan pernyataan akun @TrioMacan2000 dengan mengatakan Cina adalah penghancur dan penyuap calon Presiden, maka akun @PartaiSocMed menyerang dengan menuliskan pemimpin dengan paham fasisme yang selalu rasis masih ada di Indonesia, bahkan disebutkan oleh akun @PartaiSocMed bahwa kehadiran kaum Fasisme di dunia maya tersebut diwakili oleh akun @TrioMacan2000. Kultwit tersebut saling serang dengan pola ironi, atau menyindir kasar. Bahasa yang digunakan adalah cenderung bentuk disfemisme atau pengasaran atau bersifat sarkasme, sehingga dapat mensugesti masyarakat akan kekajaman dan kerusakan sistem pemerintahan masing-masing.

Pemimpin Untuk Rakyat

Pada tanggal 28 Maret, akun @Fadjoel mengunggah informasi seputar pemimpin Indonesia. Dalam tweetnya ia mengajak masyarakat *twitter* untuk membedakan pemimpin-pemimpin yang baik. Dikatakan:

Tweeps bedakan pemimpin KEJAM dengan pemimpin TEGAS. Yang kejam itu penjahat HAM, yang tegas setia pada KONSTITUSI dan melayani rakyat ~ FR (Rachman F. , 2014).

Dari pemilihan bahasa, akun @Fadjroel menggunakan kata baku. Kata baku pada umumnya digunakan untuk menunjukkan bahwa pengucap atau penutur sedang dalam keadaan serius.

Kalimat yang diunggah oleh akun @Fadjroel tersebut tergolong jenis kalimat perintah atau himbauan. Khalayak diajak untuk dapat membedakan antara pemimpin yang tegas dan pemimpin yang kejam. Pemakaian kata ‘pemimpin’ sebagai objek pembicaraan disini merupakan bentuk susunan kalimat aktif. Pengelompokan objek menurut Eriyanto adalah sebuah strategi untuk mewacanakan sosok atau aktor. Pengelompokan tersebut dalam pola analisa Leeuwen disebut dengan *Inclusion*-kategorisasi. Yakni seseorang, baik itu sebagai pelaku atau korban, ditampilkan dengan mengkategorikan bersifat baik atau buruk. Kategorisasi yang diberikan pada pemimpin oleh akun @Fadjroel ada dua, yakni pemimpin tegas dan pemimpin kejam. Dikatakan oleh @Fadjroel bahwa pemimpin yang kejam akan melanggar hukum HAM dan pemimpin tegas akan menghormati konstitusi serta akan melayani rakyat.

Kategorisasi ini dapat memberikan sugesti kepada khalayak bahwa sosok presiden yang baik adalah yang tidak mungkin melanggar hak-hak rakyat. Kategorisasi ini juga sebenarnya membawa ideologi pengunggahnya, bahwa akun @Fadjroel ingin membawa opini tersebut untuk memarjinalkan satu tokoh pemimpin. Pada bulan Maret, sudah tersebar di media massa dan internet bahwa calon Presiden dan wakil presiden yang memiliki populer tertinggi adalah Prabowo dan Jokowi. Misi dan visi keduanya sangat berbeda dan berkarakter. Prabowo dalam partai Gerindra menyatakan bahwa Misinya adalah menciptakan Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kuat Tegas, dan Efektif (Gerindra, 2014). Sedangkan salah satu misi Jokowi adalah mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum (Iqbal, 2014).

Dengan mengkomunikasikan kalimat tersebut maka ia juga mengkomunikasikan bahwa rakyat Indonesia tidak membutuhkan ketegasan

fisik yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Indonesia membutuhkan kedemokrasian dengan landasan hukum yang kuat.

Sedangkan di sisi yang berbeda, akun @TrioMacan2000 mencoba memberikan informasi seputar Jokowi, kubu lawan calon Presiden pelanggaran HAM. Akun ini menuliskan kultwit dengan judul *'Jokowi: Calon Presiden Boneka Megawati dan PDIP'*. Kultwit ini sempat menjadikan media massa seperti TV One membahas dan menjadikan kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil. Kultwit tersebut diunggah pada tanggal 10 Maret 2014.

Diceritakan dalam kultwit tersebut bahwa Megawati terpaksa mencalonkan Jokowi sebagai Calon Presiden Indonesia. Megawati dipaksa, didesak, dirayu, diancam, dan diultimatum oleh pihak asing dan konglomerat cina untuk mencalonkan Jokowi sebagai wakil PDIP dalam pemilihan umum presiden 2014.

Dalam memilih bahasa akun @TrioMacan2000 menggunakan bahasa formal dan informal. Perpaduan tersebut menghasilkan susunan *tweet* yang mudah untuk dibaca. Ketidakformalan juga terlihat dari sapaan khas akun dan visualisasi yang dituliskan, yakni 'eng ing eng...' dan 'hehe'. Kalimat 'eng ing eng..' telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat sapaan yang sejajar dengan kata 'taraaa!!' yang biasa dilakukan oleh badut apabila memberikan kejutan kepada penontonnya. Secara tidak langsung hal ini juga menunjukkan bahwa akun @TrioMacan2000 mengidentifikasi dirinya seperti halnya penyaji atau produsen yang menghadirkan sebuah informasi.

| Obyek | Kata Kerja Pasif |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Megawati ➤ Jokowi | <i>didesak, ditekan, dirayu, diancam, diultimatum, dilakukan, disikat, dihantam, dibilang, dihembus, ditinggalkan, dipaksa, dijajah, didirikan, dicapreskan, direbut, dikuasai.</i> |

Tabel Kata Kerja 3

Kebebasan Berkomunikasi Verbal untuk Memilih: a New trend

Munculnya teknologi bukan berarti sebuah masalah bagi berbagai negara. Negara yang membutuhkan wadah untuk mempraktikkan demokrasi atau kebebasan pasti merasa tertolong dengan adanya teknologi berbasis media

sosial. Indonesia, salah satu negara demokrasi yang kehilangan kepercayaan akan media massa sudah mulai mengikuti alur *western* untuk mendekatkan diri antara rakyat dan politisi.

Sifatnya yang partisipatori dan egalitarian menjadikan banyak opini dari berbagai pihak masuk untuk bersuara. Salah satu ciri negara demokrasi di Indonesia mengenai partisipan dapat terealisasikan melalui kehadiran internet. Masyarakat Indonesia dapat dengan bebas menyuarakan berbagai ide dan opini tanpa ada sensor dari pemerintah atau keberpihakan dari komoditas partai atau pihak manapun. Masyarakat Indonesia baik dari kalangan atas maupun bawah mendapatkan posisi yang sama untuk mendapatkan informasi seputar politik dan hukum di dalam internet.

Egalitarian internet atau kesamaan derajat juga membawa dampak negatif bagi beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Munculnya identitas tanpa nama yang menyebarkan kalimat provokatif dan privatif menjadikan demokrasi di Indonesia menjelang pemilihan umum Presiden 2014 ricuh. Seperti contoh perilaku dan tindakan kreatif yang dilakukan oleh akun @Fadjroel, @PartaiSocMed, dan @TrioMacan2000 adalah bentuk dari upaya politisi dan aktivis yang bergerak di bidang politik untuk mendekatkan diri dan memberi informasi mengenai politik Indonesia kepada khalayak pemakai media sosial.

Kalimat sarkasme yang terjadi di dalam *twitter* merupakan bentuk opini masing-masing akun terhadap akun yang lain. Opini mereka adalah bagian dari kekuatan mereka. Mengingat pernyataan Leslie Thiele *Politics is about power, power is about influence* (Thiele, 2002). Sebenarnya konsep politik adalah kekuasaan, sedangkan konsep kekuasaan adalah sebuah pengaruh. Sehingga untuk mendapatkan massa dalam mendukung sebuah ideologi tertentu, opini sangat penting untuk dikomunikasikan agar membentuk pengaruh kepada massa.

Di era *post-modern* ini pengaruh akan sosok pemimpin lebih dibutuhkan daripada sosok sebuah partai. Hal ini ditegaskan oleh Harold Lasswell dalam bukunya *Politics Who Gets What, When, and How*. Dalam

buku tersebut dituliskan politik itu tentang bagaimana seseorang mendapatkan kepentingannya, yang tergantung proses-proses apa, dan tergantung jadwalnya. Politik adalah tentang perjuangan individu untuk melindungi kebutuhan-kebutuhannya. Lesswell juga mengatakan bahwa di era *post-modern* ini politik selalu memperlmasalahkan apa yang akan kamu lakukan dan ingin dibentuk seperti apa identitasmu (Thiele, 2002). Oleh karena itu, praktik penulisan wacana dengan menggunakan kalimat ironi dan sarkasme dilakukan oleh akun @TrioMacan2000 terhadap Jokowi, dan oleh akun @Fadjroel dan @PartaiSocMed kepada sosok Prabowo adalah upaya untuk menciptakan pengaruh sosok pemimpin pada khalayak. Mereka menggunakan pola susunan *Inclusion* untuk mempengaruhi khalayak bahwa sosok pilihan mereka lebih baik dari sosok pilihan lawan politiknya.

Hal yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah tindakan atau perilaku seperti ini adalah hal baru? Perilaku yang dilakukan bukan lah hal baru di Indonesia, namun wadah dan dampaknya memberikan warna yang berbeda pada dunia politik Indonesia. Mengingat praktik kebebasan yang telah mewarnai pemilu pasca bergulingnya orde baru, maka kita akan melihat bagaimana politisi seperti ikan yang memasuki kolam barunya. Mereka berenang bebas dan tak pernah sadar bahwa tindakan mereka bukanlah bagian dari kebebasan yang sesungguhnya. Masa reformasi adalah masa di mana rakyat menemukan demokratisnya Indonesia. Menurut Henry Subiakto dan Rachmah Ida, kebebasan ini memang lebih membawa kondisi politik lebih jujur dan adil dibandingkan dengan masa orde baru. Namun, belum mampu sepenuhnya menumbuhkan demokrasi di segala aspek kehidupan, terlebih dalam masalah pengungkapan berbagai aspirasi (Subiakto & Ida, 2012).

Dikatakan oleh Eklof, jika sebelum hadirnya teknologi internet, berbagai demonstrasi terjadi sebagai bentuk pengungkapan aspirasi rakyat. Pada proses pemilihan umum, tak jarang dilakukan konvoi mobil dan motor dengan memakai berbagai simbol partai merubah warna berbagai kota di Indonesia. Sehingga setelah runtuhnya Orde Baru, masyarakat menyebut pengungkapan aspirasi tersebut dengan pesta demokrasi. Kampanye pemilu

legislatif pada tahun 1997 terjadi secara masive dan menjadikan kondisi negara tidak aman. Pada tanggal 27 Mei 1997, kampanye terbuka diadakan selama 27 hari. Suporter dari tiga partai besar yang boleh menduduki masing-masing provinsi di Indonesia bisa bergantian tiga hari sekali. Bahkan sering terjadi kekerasan seperti pelemparan telur dan pemboikotan mobil. Untuk mengantisipasi kejadian kekerasan itu, menjelang pemilihan Presiden 1999, pemerintah mengadakan kampanye politik yang lebih dewasa, yakni dengan mengadakan acara debat perwakilan di televisi (Eklof, 2003).

Setelah tahun 1996, tepatnya tanggal 27 Juli, MacDougall menyambungkan media masa *Apakabar* dengan internet. Pada saat yang sama ketua YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Hendaridi menciptakan basis pertolongan pertama pada serangan yang dialami agen PDI dengan menyambungkan email <pdimegawati@indonesia.raya > karena pada saat itu televisi dan media massa mengalami pemboikotan oleh pemerintahan rezim Soeharto. setelah itu muncullah berbagai macam partai politik yang memiliki email. Pertama kali adalah PPP, kemudian disusul PAN, dan PDI-P, serta GOLKAR (Hill & Sen, 2005).

Dengan hadirnya internet, tindakan berpolitik rakyat Indonesia tidak lagi mengalami kekerasan fisik. Hal tersebut dapat memecahkan kesatuan dan persatuan Negara Indonesia. Kerusakan tersebut memang tidak terjadi pada elit politik, namun rakyat kecil yang menjadi simpatisan dan *supporter* justru mengalami perpecahan terlebih dahulu. Hal ini karena dari kalangan bawah, informasi dan makna di balik kecintaannya pada suatu kelompok tidak diimbangi dengan pemikiran rasional.

Jika para ahli komunikasi politik mengatakan kemampuan orang untuk bicara dalam proses politik sangat penting, maka dengan adanya *twitter* inilah politisi dan aktivis dapat merepresentasikan *communication skill* nya. Henry Subiakto dan Rachmah Ida mengatakan, jika berbicara adalah sangat penting, maka meningkatkan apa yang dibicarakan akan sangat dibutuhkan dalam memperbaiki pola berbicara (Subiakto & Ida, 2012). Hal tersebut adalah benar, karena mengenal kebebasan tanpa batas yang ada di dunia *twitter* tidak akan

ada bedanya dengan area fisik jika tidak diimbangi dengan mental kognisi yang baik pula. Internet juga akan menjadi wadah pertenggaran ideologi yang berimbang pada ketidak stabilan kondisi politik dan eakonomi di dunia nyata.

Apabila kemampuan berbicara yang baik diterapkan oleh politisi dan aktivis di *twitter*, hal tersebut akan membawa dampak baik terhadap kognisi khalayak dalam menerima pendidikan seputar politik dan hukum di Indonesia. Namun, mengingat target politisi dan aktivis untuk mendapatkan pendukung dan pengikut sebanyak-banyaknya, maka *twitter* bukan lagi wadah untuk berbicara baik. *Twitter* sudah menjadi wadah untuk meningkatkan komoditi partai politik, politisi dan aktivis. Kehadirannya digunakan setiap waktu, kehadirannya digunakan dengan menyamakan antara privasi dan publik, kehadirannya juga dinilai mampu mendongkrak popularitas politisi.

Dengan *twitter*, politik tidak lagi menjadi sesuatu yang formal, namun informal. Bahkan dengan adanya *twitter*, aktivis, politisi, maupun Presiden bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti untuk dikritisi. Partisipan dapat mengirim kritik, saran, bahkan olokan langsung kepada mereka. Dikatakan oleh Henry Subiakto dan Rachmah Ida, bahwa politik dalam dunia budaya populer sudah seperti panggung hiburan yang dibalut bahasa manipulatif (Subiakto & Ida, 2012). Mereka dengan manis mengucapkan informasi politik dengan tujuan menarik simpati masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana politik bisa menjadi trend baru untuk memilih pemimpin? Mengingat pernyataan Henry Subaikto dan Rachmah Ida bahwa kaum muda dan minoritas dari berbagai kelompok kini lebih banyak terlibat dengan *collective space* yang terdapat pada media baru berbasis internet. Media baru tersebut menawarkan aplikasi sosial yang melibatkan dan mengharuskan mereka untuk memiliki teman sebanyak-banyaknya. Menurut Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Budi Setiawan pada tahun 2012 pengguna twitter 19,5 juta pengguna twitter dan kebanyakan adalah anak muda (Wahyudi, 2012). Serta dikatakan oleh Effendi Gazali bahwa akhir 2013 pengguna twitter Indonesia mencapai angka 30 juta (Gazali, 2014). Dalam waktu setahun kita dapat mengetahui bahwa

hegemoni penggunaan twitter oleh kaum muda Indonesia meningkat sangat tajam. Hal ini juga mendorong mereka untuk mengetahui informasi-informasi seputar politik.

Kaum muda tidak lagi enggan membaca dan mengetahui isu-isu politik di Indonesia. Hal ini pula yang mendorong para aktivis dan politisi untuk mencari simpati dan pengikut sebanyak-banyaknya. Untuk itu banyak politisi dan aktivis dalam dunia cyber menggunakan bahasa yang ringan dan bahasa sehari-hari untuk menarik dan menjadikan topik pembahasan politik mereka dapat diterima oleh kaum muda. Penggunaan bahasa informal seperti 'eng ing eng' oleh akun @TrioMacan2000 terbukti telah menjadi *brand* atau identitas yang menarik pengikutnya untuk membaca informasi-informasi seputar skandal pejabat dan politisi. Penggunaan bahasa gaul serta kasar oleh akun @Fadjoel juga dapat menarik pengikut muda untuk berani mengkritisi politisi dan pejabat secara bebas di twitter. Hal ini juga berarti bahwa praktik bahasa ironi dan sarkasme dalam konteks politik di media sosial merupakan bentuk budaya anak muda atau *youth culture*.

Menurut Sefton dan Green *youth culture* atau budaya anak muda bercirikan lebih muda, optimis, dan lebih santai antara kerja dan hiburan. Budaya anak muda lebih seperti anak kecil yang selalu menindas satu sama lain, cuek, bersih dan suka kotor, bebal dan intuitif (Sefton & Green, 2003). Hal ini terjadi dalam praktik penulisan tweet seputar sosok Presiden Indonesia. Akun-akun tersebut dengan bebas menindas satu sama lain dengan kalimat ironi dengan tujuan memarjinalkan, mereka juga bebal walaupun sudah ada peringatan dari pemerintah berupa UU ITE, mereka juga suka bermain kotor dengan memfitnah dan menghina.

Bahkan akun @TrioMacan2000 tak pernah ragu menggunakan praktik penggunaan bahasa kasar (difemisme) untuk mendapatkan kesan lucu dan mendramatisir keadaan. Dramatisasi berita yang dituliskan memang terbukti dapat menarik akun-akun lain untuk mengikutinya. Sebanyak 803.000 akun telah mengikuti akun @TrioMacan2000. Jumlah tersebut melebihi jumlah akun @Fadjoel dan @PartaiSocMed. Sukanto Mamada, merupakan salah

satu pengikutnya, pada bulan November 2013 pada blog Kompasiana.com kolom media mainstream menuliskan opininya bahwa ia tertarik mengikuti akun @TrioMacan2000 karena gemar menuliskan informasi seputar skandal politisi dan pejabat yang tidak terduga sebelumnya (Mamada, 2013).

Hal ini juga menunjukkan bahwa politik di media sosial, membantu masyarakat Indonesia untuk lebih berani mengungkapkan opini, kritik, dan saran. Demokrasi terjadi di dunia maya juga mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang lebih cerdas dari era sebelumnya karena merebaknya informasi-informasi secara masive dan mudah. Namun, kelemahan dari demokrasi tersebut adalah autentisiti atau keaslian berita yang diunggah masih belum bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Menurut Henry Subiakto dan Rachmah Ida, keahlian tidak hanya berlaku untuk menuliskan informasi, namun juga harus berlaku pada pembacaan atau pendengaran informasi. Sehingga upaya pencurigaan akan politisi tidak harus terjadi secara terus menerus, yang mana nanti akan menimbulkan konflik. Demokrasi yang baik adalah yang di dalam satu wadah terdapat berbagai macam suara. Demokrasi yang baik adalah adanya dialektika antara satu orang dengan orang yang lain. Namun, semangat berdemokrasi yang tidak dibarengi oleh kecerdasan emosional tidak ada bedanya dengan demokrasi era sebelumnya, dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan.

Simpulan

Dalam *tweet* politik yang mewacanakan calon Presiden Indonesia 2014 oleh akun @Fadjroel, @PartaiSocMed, dan @TrioMacan2000 ini terdapat beberapa hal yang menjadikan kondisi politik di Indonesia kurang stabil. Dalam mewacanakan sosok Presiden, ada tiga diskursus penting yang dibahas dalam kurun waktu tersebut, yakni seputar Presiden yang cinta negara, dan Presiden untuk rakyat. Dalam mewacanakan sosok Presiden tersebut, tiap akun melakukan berbagai macam strategi yang dapat dilihat dari susunan kata dan kalimatnya. Bahasa informal atau bahasa sehari-hari yang terkesan bebal dan gaul dapat menarik partisipator politik kaum muda lebih banyak. Hal ini juga

mengingat bahwa di dalam dunia cyber target setiap akun adalah semakin banyak pembacaan (*reply*, *retweet*, dan *favorite*) adalah ukuran dari kesuksesan. Sehingga ketiga akun tersebut seolah menjadikan bahasa politik dapat diterima oleh semua khalayak. Hal ini juga menunjukkan bahwa target mereka tidak hanya kalangan menengah ke atas, namun juga menengah ke bawah.

Yakni pertama media sosial mendukung setiap warga untuk bebas berekspresi. Kedua kesamaan mendapat ilmu dan pengetahuan seputar politik. Kemudian demokrasi di media sosial memang dapat dijalankan, namun praktik yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan praktik demokrasi melalui bahasa non-verbal, atau demonstrasi. Politisi, aktivis, dan masyarakat harus meningkatkan kognisi dan isi pembicaraan untuk menghindari perpecahan persatuan dan kesatuan hanya karena informasi yang tertulis di dunia maya.

Daftar Pusaka

- Aco, H. (2013). *Tribunnews.com*. Dipetik Januari 18, 2014, dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/14/punya-punya-akun-twitter-sby-bisa-gunakan-untuk-blusukan>
- Bell, D. (2001). *An Introduction of Cyberspace* (Pertama ed.). New York: Routledge.
- Bell, D. (2013). *Cyberculture Theorists* (Pertama ed.). Perancis: Routledge.
- ComScore.Com. (2010). *ComScore.Com*. Dipetik Januari 23, 2014, dari http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2010/8/Indonesia_Brazil_and_Venezuela_Lead_Global_Surge_in_Twitter_Usage
- Cottle, S. (2006). *Mediatized Conflict* (Pertama ed.). New York: McGraw-Hill.
- Cross, M. (2011). *Bloggerati and Twitterati: How Blog and Twitter are Transforming Popular Culture* (Pertama ed.). California: Praeger.
- Eklof, S. (2003). *Power and Political Culture in Soeharto Era*. Denmark: NIAS Press.
- Eriyanto. (2006). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Pertama ed.). Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourses* (First ed.). New York: Routledge.
- Gazali, E. (2014). Learning by Clicking: An Experiment with Social Media Democracy in Indonesia. *International Communication Gazette* , 76/5-6/425.
- Hill, D. T., & Sen, K. (2005). *The Internet in Indonesia's Democracy* (First ed.). New York: Routledge.
- Hine, C. (2000). *Virtual Ethnography* (First ed.). London: Sage Library.

- Kellner, D. (1990). *Habermas, The Public Sphere and Democracy: A critical intervention*. Dipetik Maret 28, 2014, dari <http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/habermas.htm>
- Mamada, S. (2013, November 15). *Media Mainstream*. Dipetik Agustus 29, 2014, dari Kompasiana.com: <http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/11/15/debar-eng-ing-eng--608275.html>
- Matrix, S. E. (2006). *CyberPop: Digial Lifestyle and Commodity Culture* (First ed.). London: Routledge.
- Media, P. S. (2014, Februari 24). *Mengenal Fasisme Kekinian*. Dipetik Februari 25, 2014, dari Chirpstory: <http://chirpstory.com/li/191131>
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia* (pertama ed.). Singapore: NUS press.
- Miles, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (1 ed.). Jakarta: UI press.
- Rachman, F. (2014, January 23). @Fadjroel. Dipetik January 23, 2014, dari Twitter: <https://twitter.com/fadjroel>
- Rachman, F. (2014, Maret 28). *Status*. Dipetik Maret 28, 2014, dari Twitter: <https://twitter.com/fadjroel/status/449792567907864576>
- Saco, D. (2002). *Cybering Democracy: Public Sphere and The Internet*. Mineapolish: University of Minnesota.
- Scharm, S. (2000). *After Welfare*. New York: New York Press.
- Sefton, J., & Green. (2003). *Digital Diversion: Youth Culture in The Age of Multimedia*. London: Tylor and Francis e-Library.
- Simon, L. D., Corrales, J., & Wolfensberger, D. R. (2002). *Demokrasi dan Internet Kawan atau Lawan?* Yogyakarta: The Johns Hopkins University Press & Tiara Wacana Yogya.
- Sohn, Y. (2005). *Opinion Leaders and Seekers in Online Brand Communities: Centered in Korean Digital Camera Brand Communities*. Florida: Department of Communication Master of Science- Florida State University.
- Subiakto, H., & Ida, R. (2012). *Komunikasi, Politik, Media, Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thiele, L. P. (2002). *Thinking Politics: Perspective in Ancient, Modern, Postmodern Political Theory*. New York: Seven Bridges Press.
- Wong, W., & Brown, A. (2012). No body from everywhere: IR and the Politics of Wikileaks and Anonymous. *BSIA conference*. Canada: University of Waterloo.
- Zittel, T., & Fuchs, D. (2007). *Participatory Democracy and Political Participation Can participatories Engineering Bring Citizen Back in* . Canada: Routledge.